

**PENGARUH INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

TIARA AMALIA RAHMAYANI

NPM 2416041101



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
DAFTAR ISI.....	i
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	1
2.1 Penelitian Terdahulu.....	1
2.2 Konsep Birokrasi.....	6
2.3 Konsep Komunikasi Massa.....	8
2.4 Konsep Good Governance.....	9
2.5 Kerangka Berfikir.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang relevan untuk memahami konteks dan fenomena yang sedang diteliti. Tinjauan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah atau kebaruan (research gap) yang akan diisi oleh penelitian ini. Berikut adalah perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa studi sebelumnya, diikuti dengan penjelasan mendalam mengenai setiap perbedaannya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Andre Noevi Rahmanto (2022)	Pengaruh penggunaan media sosial pemerintah daerah di Solo Raya terhadap persepsi publik tentang good governance, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.	Ditemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi publik mengenai good governance dan ketiga aspeknya (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), meskipun pengaruhnya masih tergolong rendah, yaitu sebesar 4,2%.	Penelitian ini berfokus pada pendekatan kuantitatif dengan metode survei, sementara penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada makna dan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang ada. Selain itu, lokus penelitiannya berbeda.

Fahrul Vicky Anggiawan (2023)	Optimalisasi publikasi informasi pemerintah melalui media sosial di Kabupaten Sukoharjo.	Menemukan bahwa masyarakat di Kabupaten Sukoharjo peka terhadap informasi di media sosial pemerintah dan sebagian besar mendapatkan pengaruh positif. Namun, masih ada isu politik yang tersirat, dan ada masyarakat yang memberikan komentar negatif terkait unggahan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, tetapi fokusnya pada optimalisasi informasi dan pengaruhnya secara umum. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dipengaruhi oleh informasi di media sosial pemerintah daerah.
Julpahmi (2023)	Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi milenial Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) pada Pemilu Presiden 2019.	Penggunaan media sosial berpengaruh sebesar 29% terhadap partisipasi politik generasi milenial HAMAS pada Pemilu 2019. Meskipun partisipasi politik secara umum rendah (11,43%), mayoritas responden (90,48%) tetap memberikan suara.	Penelitian ini fokus pada partisipasi politik generasi milenial dalam konteks Pemilu. Penelitian ini akan fokus pada partisipasi masyarakat umum dalam konteks program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Meskipun sama-sama menggunakan media sosial, konteksnya berbeda

Ulfa Umayasari & Goestyari Kurnia Amantha (2025)	Partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta perumusan kebijakan pemerintah daerah di Lampung.	Partisipasi digital di Lampung sudah berkembang, tetapi masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital (digital divide), literasi yang belum merata, dan resistensi birokrasi. Partisipasi digital warga mampu meningkatkan akuntabilitas dan mempengaruhi kebijakan, seperti kasus viral perbaikan jalan.	Penelitian ini memiliki kesamaan topik, yaitu partisipasi digital di Lampung. Namun, penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis data sekunder, sedangkan penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif mendalam yang kemungkinan akan melibatkan pengumpulan data primer, seperti wawancara, untuk menggali makna dari fenomena tersebut secara lebih komprehensif.
--	---	--	--

Penjelasan Mendalam Perbedaan Penelitian

- Perbedaan dengan Andre Noevi Rahmanto (2022):

Penelitian Rahmanto (2022) yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Komunikasi adalah studi kuantitatif yang mengukur hubungan sebab-akibat antara penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah dan persepsi publik terhadap good governance. Penelitian tersebut menggunakan metode survei dengan sampel 210 responden untuk menghasilkan data numerik yang dianalisis secara statistik. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam (bukan mengukur) bagaimana proses komunikasi dan interaksi di media sosial membentuk makna dan interpretasi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

- Perbedaan dengan Fahrul Vicky Anggiawan (2023):

Skripsi oleh Anggiawan (2023) berfokus pada "optimalisasi publikasi informasi" pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. Meskipun menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian tersebut cenderung bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan praktik yang sudah ada. Sementara itu, penelitian saya memiliki fokus yang lebih spesifik dan analitis, yaitu mengkaji partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan mendeskripsikan bagaimana informasi disebar, tetapi juga menganalisis bagaimana informasi tersebut secara konkret mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat.

- Perbedaan dengan Julpahmi (2023):

Penelitian yang dilakukan oleh Julpahmi (2023) memiliki topik yang mirip, yaitu pengaruh media sosial terhadap partisipasi. Namun, konteksnya sangat berbeda. Penelitian tersebut secara khusus mengkaji partisipasi politik dari kelompok spesifik (generasi milenial HAMAS) dalam konteks Pemilihan Umum Presiden. Sebaliknya, penelitian saya akan berfokus pada partisipasi masyarakat umum dalam konteks pembangunan daerah, yang merupakan ranah administrasi publik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun isu utamanya sama (media sosial dan partisipasi), lokus dan fokus substansialnya berbeda.

- Perbedaan dengan Ulfa Umayasari & Goestyari Kurnia Amantha (2025):

Studi ini sangat relevan karena membahas partisipasi digital warga di Lampung, lokasi yang sama dengan penelitian saya. Namun, artikel ini menggunakan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Dengan kata lain, penelitian tersebut tidak melibatkan pengumpulan data di lapangan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian saya memiliki kebaruan karena akan melakukan studi kualitatif secara mendalam dengan pengumpulan data primer, seperti wawancara dan observasi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif mengenai fenomena tersebut.

Dari tinjauan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara media sosial dan partisipasi publik, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji pengaruh media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dengan pendekatan kualitatif. Celah penelitian (research gap) ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut, memberikan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti.

2.2 Konsep Birokrasi

Dalam menganalisis fenomena partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang difasilitasi oleh media sosial, landasan teoretis yang paling fundamental dalam administrasi publik adalah konsep birokrasi. Teori ini, yang diperkenalkan oleh sosiolog terkemuka Max Weber, mengonseptualisasikan birokrasi sebagai sebuah model organisasi yang ideal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Weber, birokrasi yang ideal memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadi acuan rasionalitas dalam sebuah organisasi:

- Adanya hierarki wewenang yang jelas: Setiap pejabat memiliki posisi dan tanggung jawab yang terstruktur dalam sebuah hierarki yang jelas dan tegas. Hal ini memastikan alur komando dari atas ke bawah berjalan secara efisien dan terorganisasi.
- Aturan formal yang konsisten: Seluruh aktivitas birokrasi diatur oleh seperangkat aturan dan prosedur yang tertulis dan formal. Prosedur ini bersifat baku dan diterapkan secara konsisten pada setiap kasus yang serupa, sehingga memungkinkan adanya sistematisasi dan prediktabilitas dalam setiap keputusan.
- Pembagian kerja yang spesifik: Tugas dan fungsi organisasi dibagi secara rasional dan spesifik, sehingga setiap individu memiliki spesialisasi dan kewajiban resmi yang jelas.
- Impersonalitas dalam pelaksanaan tugas: Birokrat ideal menjalankan tugasnya secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi, prasangka, atau kepentingan golongan. Weber menyebutkan bahwa pejabat yang ideal harus bertindak tanpa “kebencian atau kegairahan,” demi menjunjung tinggi sistem meritokrasi.
- Spesialisasi: Birokrat dipilih berdasarkan kualifikasi teknis dan keahlian, bukan karena koneksi atau latar belakang keluarga. Profesionalisme menjadi kunci dalam sistem ini.

Namun, dalam praktiknya, birokrasi sering kali mengalami patologi, di mana prosedur yang kaku dan lamban menjadi penghambat utama, terutama di era digital yang menuntut respons cepat dan fleksibilitas. Seperti yang disebutkan dalam referensi Anda, birokrasi sering dimaknai secara negatif sebagai prosedur yang “berbelit-belit, menyulitkan, dan menjengkelkan”. Lebih dari itu, birokrasi juga rentan terhadap kecenderungan untuk melayani diri sendiri dan mengabaikan kepentingan publik. Patologi ini menjadi hambatan besar bagi upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan tuntutan masyarakat di era digital.

Dalam konteks Indonesia, birokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek struktural, tetapi juga oleh budaya lokal. Perbedaan budaya dan geografis dapat mengakibatkan perbedaan dalam perilaku dan sikap dalam kegiatan organisasi, yang berujung pada perbedaan hasil kinerja. Salah satu contohnya adalah budaya birokrasi di Indonesia yang terpengaruh oleh budaya Jawa yang hierarkis dan tertutup, yang cenderung menghilangkan variasi dan menciptakan keseragaman dalam prosedur.

Dengan demikian, pemahaman terhadap birokrasi menjadi sangat penting sebagai landasan untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah, sebagai sebuah entitas birokratis, beradaptasi dan mengelola interaksi dengan masyarakat di media sosial. Hal ini menjadi titik awal yang krusial untuk melihat apakah pemerintah mampu bertransformasi dari pendekatan yang kaku menjadi lebih fleksibel dan partisipatif dalam menyediakan pelayanan publik.

2.3 Konsep Komunikasi Massa

Untuk menjembatani pemahaman birokrasi yang bersifat struktural dan kaku dengan fenomena dinamis di media sosial, penelitian ini mengadopsi Teori Komunikasi Massa oleh Denis McQuail. Teori ini sangat relevan untuk menguraikan proses komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat di platform digital. Dalam skripsi Anggiawan (2023), disebutkan bahwa "Penelitian ini menggunakan Teori Komunikasi Massa oleh Denis McQuail dengan dimensi Structure, Organizations, Content, Audiences, dan Effects".

McQuail's Mass Communication Theory menyediakan kerangka analisis yang lebih spesifik untuk mengkaji fenomena media massa, yang dalam hal ini adalah media sosial pemerintah daerah. Berikut adalah lima dimensi utama dari teori ini yang akan digunakan sebagai alat analisis:

- **Struktur (Structure):** Dimensi ini mengkaji semua hal yang berkaitan dengan sistem mediasi. Ini mencakup bagaimana media sosial diatur oleh pemerintah, regulasinya, dan infrastruktur digital yang mendukungnya. Dalam konteks penelitian ini, dimensi struktur akan menganalisis bagaimana Diskominfo atau bagian pemerintah terkait mengelola akun media sosial secara teknis dan legal, serta keterkaitannya dengan sistem birokrasi yang ada.
- **Organisasi (Organizations):** Dimensi ini membahas bagaimana produksi konten dan informasi diatur dalam sebuah organisasi. Dimensi ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memproduksi konten, mempublikasikannya, dan menghadapi berbagai tuntutan dari masyarakat.
- **Konten (Content):** Fokus utama dari dimensi ini adalah pesan atau informasi yang diunggah. Analisis akan berfokus pada kebenaran, keseimbangan, kualitas, dan kredibilitas konten yang dipublikasikan oleh media sosial pemerintah. Dimensi ini penting untuk melihat apakah informasi yang disampaikan relevan dan mampu memicu partisipasi masyarakat.

- **Audiens (Audiences):** Dimensi ini menggambarkan peran masyarakat sebagai pengguna media yang aktif. Dimensi ini membantu peneliti memahami bagaimana masyarakat merespons, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam program yang diinformasikan melalui media sosial. McQuail menyatakan bahwa "audiens mengerti apa yang mereka tonton dan mereka memilihnya". Oleh karena itu, penelitian akan menganalisis motivasi di balik partisipasi audiens dan bagaimana pola interaksi ini memengaruhi keberhasilan program pembangunan.
- **Efek (Effects):** Dimensi terakhir ini menganalisis pengaruh yang dihasilkan oleh media sosial, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat dari segi sosial, politik, dan budaya. Efek di sini tidak hanya dilihat dari seberapa banyak orang yang berpartisipasi, tetapi juga bagaimana interaksi tersebut memengaruhi persepsi mereka terhadap pemerintah dan program pembangunan yang dicanangkan.

Dengan demikian, perpaduan teori birokrasi yang bersifat struktural dengan teori komunikasi massa yang bersifat dinamis akan memberikan analisis yang komprehensif. Perpaduan ini membantu untuk melihat apakah media sosial pemerintah hanya berfungsi sebagai saluran satu arah, ataukah telah menjadi ruang dialog dua arah yang efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat.

2.4 Konsep Good Governance

Konsep good governance berfungsi sebagai teori terapan yang sangat relevan untuk menganalisis keberhasilan dan efektivitas penggunaan media sosial pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Konsep ini merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya menekankan pada efisiensi, tetapi juga pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Rahmanto (2022), good governance adalah cara pandang terhadap pemerintahan yang menekankan pada proses pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini maupun di masa depan. Dalam konteks pelayanan publik, menurut Marjoni Rachman (2021), good governance bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang responsif terhadap beragam kepentingan dan nilai-nilai masyarakat, sejalan dengan konsep New Public Service yang menempatkan peran pemerintah sebagai fasilitator yang bernegosiasi dan mengelaborasi kepentingan warga.

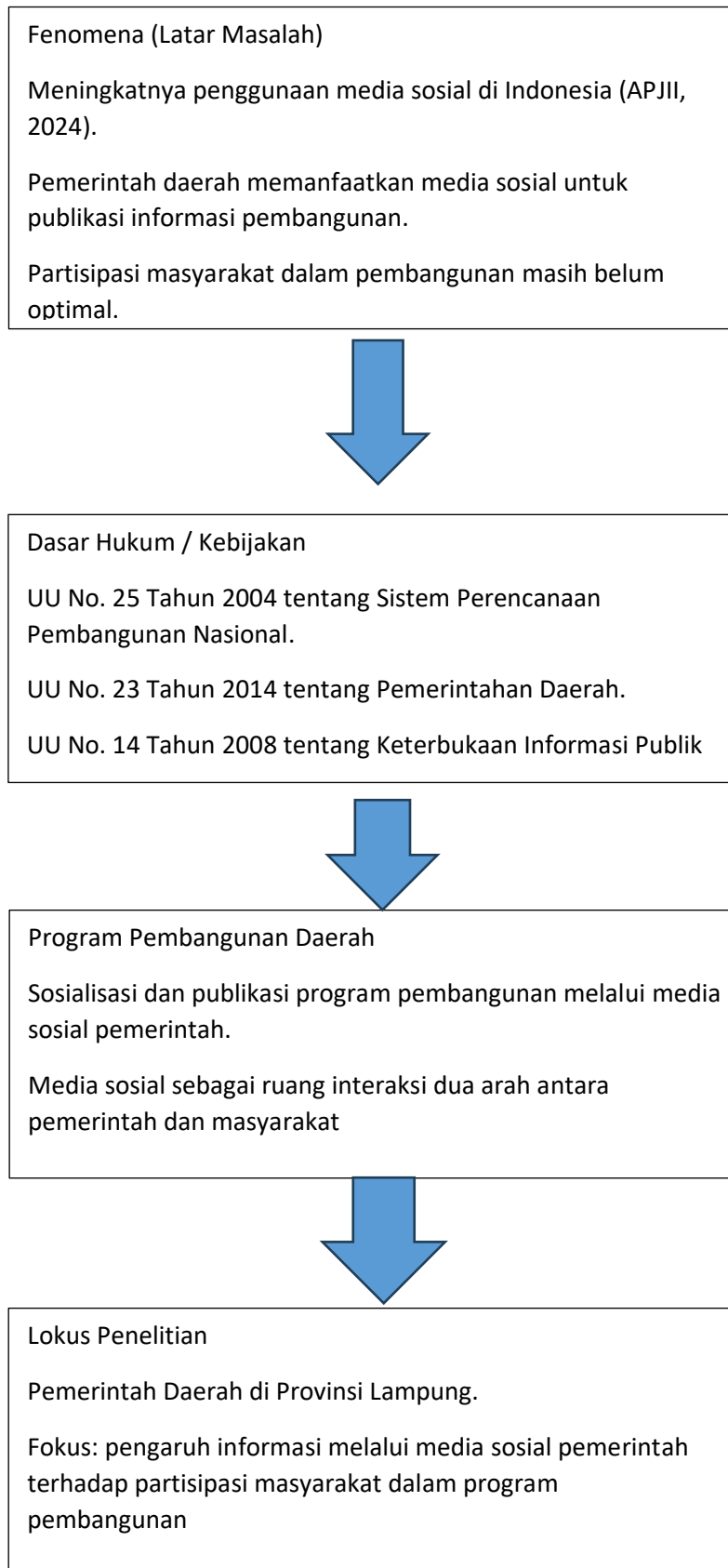
Ada tiga prinsip utama good governance yang menjadi fokus dalam penelitian ini, mengingat relevansinya yang kuat dengan fungsi media sosial: partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

- Partisipasi: Prinsip ini menekankan hak setiap warga negara untuk terlibat dalam proses bernegara dan bermasyarakat. Partisipasi digital menjadi indikator penting dalam hal ini. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif. Penelitian Umayasari & Amantha (2025) menunjukkan bahwa partisipasi warga melalui media digital memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana untuk mendorong keterlibatan warga secara langsung, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai kontributor aktif dalam program pembangunan.
- Akuntabilitas: Prinsip ini menuntut pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dalam era digital, akuntabilitas pemerintah semakin diawasi secara intens oleh publik, karena setiap tindakan dapat disorot dan mendapat umpan balik secara real-time. Hal ini menciptakan pergeseran dari akuntabilitas yang didorong oleh pemerintah (government-driven) menjadi akuntabilitas yang didorong oleh warga (citizen-driven), di mana pengawasan tidak lagi hanya melalui lembaga formal, tetapi juga oleh rakyat melalui media digital.

- **Transparansi:** Prinsip ini memastikan bahwa informasi yang relevan dan material mudah diakses dan dipahami oleh publik. Transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan membuka ruang partisipasi yang otentik, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saat warga merasa suaranya didengar dan direspons melalui kanal digital, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, dan kepercayaan inilah yang menjadi modal sosial penting dalam implementasi program.

Dengan demikian, konsep good governance dipilih karena memberikan kerangka evaluatif yang sesuai untuk menilai efektivitas penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah. Melalui prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi, penelitian ini dapat mengukur apakah praktik komunikasi digital pemerintah daerah benar-benar mencerminkan tata kelola yang baik, atau sekadar sebatas formalitas tanpa memberikan dampak nyata bagi peningkatan partisipasi masyarakat.

2.5 Kerangka Berfikir



Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah semakin meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan data APJII (2024), jumlah pengguna internet di Indonesia telah menembus 221 juta orang, yang sebagian besar aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Kondisi ini menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan media sosial sebagai kanal komunikasi publik yang lebih cepat, terbuka, dan interaktif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan belum sepenuhnya sejalan dengan intensitas informasi yang disampaikan melalui media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana informasi dari media sosial pemerintah mampu memengaruhi partisipasi masyarakat.

Secara normatif, arah kebijakan pemerintah dalam mendukung partisipasi publik tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memperkuat kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat. Kebijakan ini menjadi dasar hukum yang mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan media sosial sebagai salah satu instrumen keterbukaan informasi dan fasilitasi partisipasi publik.

Sebagai implementasi, pemerintah daerah menjalankan berbagai program pembangunan yang membutuhkan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Media sosial pemerintah daerah berfungsi sebagai media sosialisasi, publikasi, dan ruang interaksi dua arah, sehingga dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan. Efektivitas program pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat merasa terlibat dan turut memberikan kontribusi dalam proses tersebut.

Lokus penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung, khususnya melalui pemanfaatan media sosial resmi pemerintah. Wilayah ini dipilih karena memiliki dinamika pembangunan yang cukup kompleks, dengan tingkat penggunaan media sosial masyarakat yang tinggi, namun partisipasi publik dalam program pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam bagaimana informasi melalui media sosial pemerintah daerah dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiawan, F. V. (2023). ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO. [Skripsi]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, 7 Februari). APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. Diakses pada [20 Sep], dari https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang?utm_source
- Julpahmi. (2023). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK GENERASI MILENIAL HIMPUNAN MAHASISWA ACEH SELATAN (HAMAS) PADA PEMILU PRESIDEN 2019 [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rachman, M. (2021). Manajemen Pelayanan Publik. Tahta Media Group.
- Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. Jurnal Ilmu Komunikasi, 20(1), 88–100. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.6433>
- Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Partisipasi Warga Melalui Media Digital dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas serta Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Lampung. Journal of Administration, Governance, and Political Issues, 2(1), 109-124.